

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021**



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021 (*UNAUDITED*)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH.....	2
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	2
2. NERACA.....	3
3. LAPORAN OPERASIONAL.....	5
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	7
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	8
5.1 Pendahuluan.....	8
5.2. Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	11
5.3. Iktisar Pencapaian Kinerja.....	12
5.4. Kebijakan Akuntansi.....	14
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.....	20
5.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan.....	45
5.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan.....	45
5.8. Penutup.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK	10
Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021.....	13
Tabel 3. Persentase Penyisihan Piutang	17
Tabel 4. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020	21
Tabel 5. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021	23
Tabel 6. Rincian Obyek Belanja Pegawai TA 2021	23
Tabel 7. Rincian Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2021.....	23
Tabel 8. Realisasi Belanja Hibah TA 2021	24
Tabel 9. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021	24
Tabel 10. Mutasi Nilai Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021.....	25
Tabel 11. Sub Rincian Objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	25
Tabel 12. Rincian Item Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	25
Tabel 13. Mutasi Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021.....	26
Tabel 14. Mutasi Nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021..	26
Tabel 15. Mutasi Nilai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021.....	26
Tabel 16. Mutasi Nilai Belanja Modal Aset Lainnya per 31 Desember 2021.....	26
Tabel 17. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020	30
Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021.....	30
Tabel 19. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31
Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31
Tabel 21. Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	32
Tabel 22. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	32
Tabel 23. Mutasi Aset Tetap Lainnya	33
Tabel 24. Mutasi Aset KDP	33
Tabel 25. Mutasi Akumulasi Penyusutan	34
Tabel 26. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	34
Tabel 27. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	34
Tabel 28. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi.....	35
Tabel 29. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.....	35
Tabel 30. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto).....	36
Tabel 31. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto).....	36
Tabel 32. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020	36
Tabel 33. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto).....	37
Tabel 34. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	37
Tabel 35. Rincian Aset Lain-lain	37
Tabel 36. Rincian Pendapatan - LO	39
Tabel 37. Obyek PAD-LO	39
Tabel 38. Pendapatan Transfer - LO	40
Tabel 39. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO.....	41
Tabel 40. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO.....	41
Tabel 41. Beban Hibah.....	42
Tabel 42. Beban Penyusutan	42
Tabel 43. Beban Amortisasi	43
Tabel 44. Surplus/Defisit dari Operasi	43
Tabel 45. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	43
Tabel 46. Koreksi Ekuitas Lainnya	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja.....	13
Gambar 2. Komposisi Belanja	22
Gambar 3. Komposisi Realisasi Belanja Operasi	22
Gambar 4. Komposisi Belanja Modal	24



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3221716 email. sekda@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Maret 2022

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
196908061989111002

LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI SEKRETARIAT DAERAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN		Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
BELANJA DAERAH		7.5.2.2	4.169.225.750,00	4.023.909.892,00	96,51	4.398.463.125,00
BELANJA OPERASI		7.5.2.2.1	4.037.468.550,00	3.901.283.492,00	96,63	4.398.463.125,00
Belanja Pegawai		7.5.2.2.1.1	109.680.000,00	108.120.000,00	98,58	1.681.265.000,00
Belanja Barang dan Jasa		7.5.2.2.1.2	2.927.788.550,00	2.793.163.492,00	95,40	2.717.198.125,00
Belanja Hibah		7.5.2.2.1.4	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL		7.5.2.2.2	131.757.200,00	122.626.400,00	93,07	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		7.5.2.2.2.2	131.757.200,00	122.626.400,00	93,07	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		7.5.2.4	(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)	96,51	(4.398.463.125,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		7.5.2.6	(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)	96,51	(4.398.463.125,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

* SETDA SAIN, M.Si
Jemberina Utama Yuda
NIP. 19690806198111002

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.13	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	0,00	0,00
Persediaan	7.5.4.1.1.15	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	2.555.975.532,00	2.433.349.132,00
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	4.718.768.851,00	4.718.768.851,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	30.000.000,00	30.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(3.433.564.917,00)	(3.214.240.244,00)
JUMLAH ASET TETAP		3.871.179.466,00	3.967.877.739,00
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.4.1.4.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	220.500.000,00	220.500.000,00
Aset Lain-lain	7.5.4.1.4.4	243.762.216,67	243.762.216,67
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.4.1.4.3.2	(220.500.000,00)	(180.968.750,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		243.762.216,67	283.293.466,67
JUMLAH ASET		4.114.941.682,67	4.251.171.205,67
KEWAJIBAN	7.5.4.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00
Utang Beban	7.5.4.2.1.3	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
EKUITAS			
EKUITAS		4.114.941.682,67	4.251.171.205,67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.114.941.682,67	4.251.171.205,67

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

Drs. ARHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
No. 1969080/1989111002

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN		Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(Dalam Rupiah) %
KEGIATAN OPERASIONAL						
PENDAPATAN – LO		7	0,00	9.251.000,00	(9.251.000,00)	(100,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah - LO		7.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah - LO		7.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		7.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah - LO		7.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO		7.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		7.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		7.3	0,00	9.251.000,00	(9.251.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah – LO		7.3.1	0,00	9.251.000,00	(9.251.000,00)	(100,00)
Dana Darurat - LO		7.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO		7.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN		8	4.156.545.665,00	4.694.475.302,00	(537.929.637,00)	(11,46)
Beban Pegawai		8.1.1	108.120.000,00	1.681.265.000,00	(1.573.145.000,00)	(93,57)
Beban Barang dan Jasa		8.1.2	2.793.163.492,00	2.717.198.125,00	75.965.367,00	2,80
Beban Bunga		8.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		8.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		8.1.5	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		8.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		8.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Lain-lain	8.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.2.1	125.457.264,00	159.019.767,00	(33.562.503,00)	(22,11)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.2.2	93.867.409,00	93.867.410,00	(1,00)	(0,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	8.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.2.6	35.937.500,00	43.125.000,00	(7.187.500,00)	(16,67)
Beban Bagi Hasil	8.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	8.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)	528.678.637,00	(11,28)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	7.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	7.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	8.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	8.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)	528.678.637,00	(11,28)
POS LUAR BIASA					
Beban Tak Terduga	8.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)	528.678.637,00	(11,28)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	4.251.171.205,67	4.546.899.223,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
Koreksi Ekuitas Lainnya		(3.593.750,00)	(8.966.841,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		4.023.909.892,00	4.398.463.125,00
EKUITAS AKHIR	5.7.4	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,
SETDA
Drs. AKHMAD MUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
IP. 196909051989111002

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);

- v. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 1);
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 7).

5.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Profil Pemerintahan
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

5.2. Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

5.2.1. Profil Pemerintahan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kedudukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu unit atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas membantu Sekretaris Daerah di Bidang Pemerintahan dan Tata Laksana serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta memperhatikan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/11687/SJ tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Biro Pemerintahan mengalami perubahan nomenklatur per 23 September 2020 menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

5.2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.169.225.750,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.037.468.550,00, dan Belanja Modal sebesar Rp131.757.200,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.023.909.892,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.901.283.492,00, dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp122.626.400,00

Tidak ada Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.3. Iktisar Pencapaian Kinerja

5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Tidak ada pencapaian target kinerja Pendapatan selama Tahun Anggaran 2021 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari:

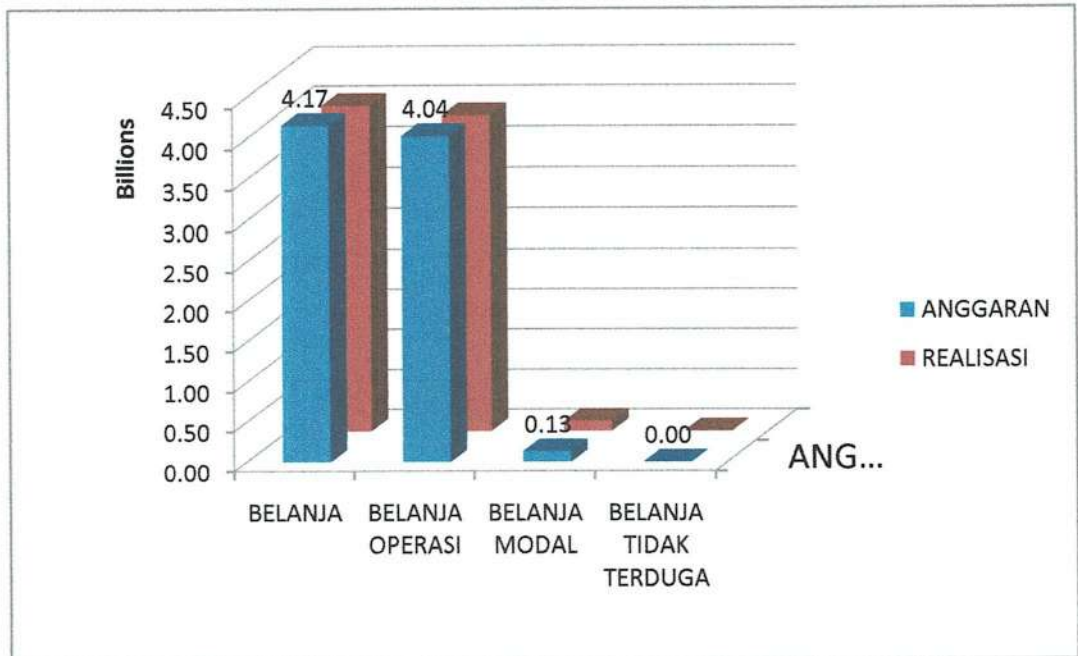
- a) Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 (0,00%);
- b) Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 (0,00%); dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 (0,00%).

b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp4.169.225.750,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.023.909.892,00 atau 96,51%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan

sebesar Rp4.037.468.550,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp3.901.283.492,00 (96,63%) atau tidak diserap sebesar Rp136.185.058,00 (3,37%); dan b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp131.757.200,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp122.626.400,00 (93,07%) atau tidak diserap sebesar Rp.9.130.800,00 (6,93%).

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Dari data realisasi pendapatan dan Belanja maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp(4.023.909.892,00).

Pencapaian target kinerja keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	4.169.225.750,00	4.023.909.892,00	96,51	4.398.463.125,00
5.1	Belanja Operasi	4.037.468.550,00	3.901.283.492,00	96,63	4.398.463.125,00
5.2	Belanja Modal	131.757.200,00	122.626.400,00	93,07	0,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)	96,51	(4.398.463.125,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)	96,51	(4.398.463.125,00)

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Dalam pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa hambatan dan kendala antara lain :

- Pandemi COVID-19 menyebabkan terpangkasnya anggaran yang berimbas pada tidak berjalannya kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Anggaran dikhususkan hanya kepada kegiatan yang bersifat rutin dan mendesak.

- b. Meskipun terdapat beberapa kendala dan hambatan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan operasional Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2021 dapat terlaksana dengan baik.

5.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional(LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sisitematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

5.4.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu

(menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Neraca;
- Laporan Operasional (LO);
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1. Pendapatan Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	0,00	0,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Tidak ada Pendapatan Daerah yang diperoleh dari kegiatan operasional Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dan Rp0,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.2.2. Belanja Daerah

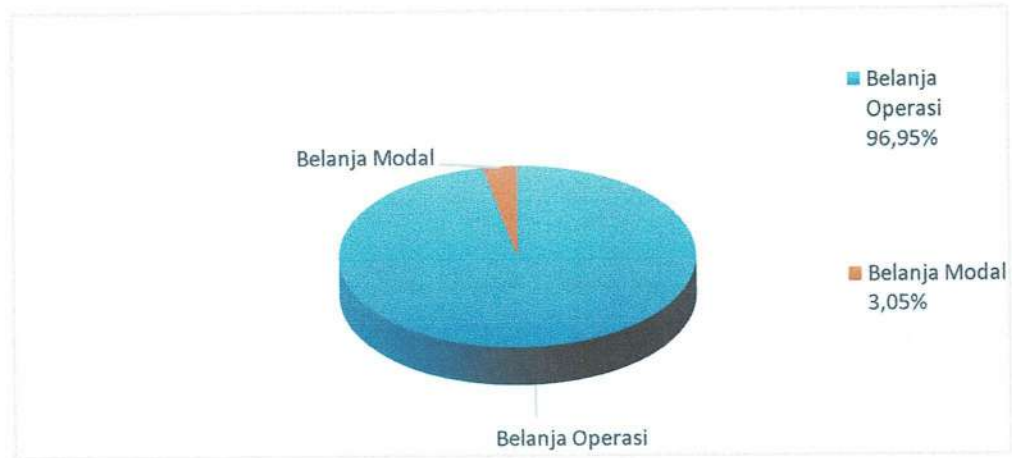
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Daerah	4.169.225.750,00	4.023.909.892,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.023.909.892,00 atau 96,51% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp4.169.225.750,00. Realisasi Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu realisasi Belanja Operasi sebesar Rp3.901.283.492,00 atau 96,63% dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp122.646.400,00 atau 93,07%.

Komposisi realisasi belanja daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 2. Komposisi Belanja

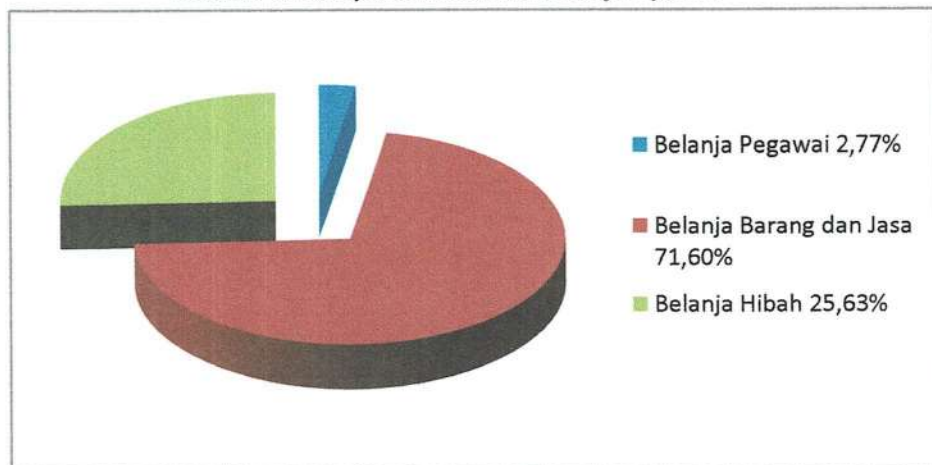


5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	4.037.468.550,00	3.901.283.492,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp4.037.468.550,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp3.901.283.492,00 atau 96,63%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp136.185.058,00 atau 3,37%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah. Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2021 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp109.680.000,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp108.120.000,00 atau 98,58%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.560.000,00 atau 1,42%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar dalam rincian objek belanjanya pada tabel sebagai berikut.

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

Tabel 5. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021

No.	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	109.680.000,00	108.120.000,00	98,58	0,00	108.120.000,00
2.	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	828.815.000,00	(828.815.000,00)
3.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	852.450.000,00	(852.450.000,00)
	Jumlah	109.680.000,00	108.120.000,00	98,58	1.681.265.000,00	(1.573.145.000,00)

Tabel 6. Rincian Obyek Belanja Pegawai TA 2021

Rincian Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Honorarium	109.680.000,00	108.120.000,00	98,58
Jumlah	109.680.000,00	108.120.000,00	98,58

Sub Rincian Obyek atas Belanja Pegawai tersebut di atas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

5.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.927.788.550,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp2.793.163.492,00 atau 95,40%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp134.625.058,00 atau 4,60%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp75.965.367,00 atau 2,80% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2020 tercatat sebesar Rp2.717.198.125,00. Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran, sebagai berikut.

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam rincian obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 7. Rincian Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2021

Rincian Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	393.624.950,00	381.764.625,00	96,99
Belanja Jasa Kantor	1.233.046.000,00	1.143.930.233,00	92,77
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.032.000,00	36.587.304,00	79,48
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.600.000,00	13.600.000,00	73,12
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.803.000,00	33.800.000,00	99,99
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.190.682.600,00	1.173.981.330,00	98,60
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Jumlah	2.927.788.550,00	2.793.163.492,00	95,40

Sub Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut di atas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran 1.

5.5.2.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar dalam rincian objek belanjanya pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8. Realisasi Belanja Hibah TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

5.5.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	131.757.200,00	122.626.400,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp131.757.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp122.626.400,00 atau 93,07%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp9.130.800,00 atau 6,93%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp122.626.400,00 atau 100,00%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 9. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	131.757.200,00	122.646.400,00	93,07	100,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	131.757.200,00	1.108.301.881.143,53	95,93	100,00

Gambar 4. Komposisi Belanja Modal



5.5.2.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Tanah yang dimiliki Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00. Tidak ada mutasi perubahan Tanah dan tidak ada Belanja Modal Tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 karena tanah merupakan satu kesatuan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rincian mutasi nilai belanja modal tanah sebagai berikut.

Tabel 10. Mutasi Nilai Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021
Saldo Awal per 1 Januari 2021 (a)	Rp -
Penambahan (b)	Rp -
Pengurangan (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp -

5.5.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp131.757.200,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp122.626.400,00 atau 93,07%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp9.130.800,00 atau 6,93%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp122.626.400,00 atau 100,00%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 11. Sub Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Alat Laboratorium Batuan/Geologi	15.000.000,00	11.660.000,00	77,73
Pengadaan Personal Komputer	84.757.200,00	79.883.000,00	94,25
Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	1.675.000,00	83,75
Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000,00	29.408.400,00	98,03
Jumlah	131.757.200,00	122.626.400,00	93,07

Rincian item belanja modal peralatan dan mesin di Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 12. Rincian Item Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1.	GPS	1	11.660.000,00	11.660.000,00
2.	Note Book	2	11.644.000,00	23.288.000,00
3.	Tablet PC	1	7.575.000,00	7.575.000,00
4.	UPS	2	837.500,00	1.675.000,00
5.	PC Unit	2	12.520.000,00	25.040.000,00
6.	Video Conference	1	20.616.000,00	20.616.000,00
7.	Mic Conference	1	5.697.000,00	5.697.000,00
8.	Headset	2	1.547.700,00	3.095.400,00
9.	Laptop	1	23.980.000,00	23.980.000,00
	Jumlah			122.626.400,00

5.5.2.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Belanja modal gedung dan bangunan tidak dianggarkan baik di Tahun 2021 maupun di Tahun 2020.

Rincian mutasi nilai belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut.

Tabel 13. Mutasi Nilai Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	31Desember 2021
Saldo Awal per 1 Januari 2021 (a)	Rp -
Penambahan (b)	Rp -
Pengurangan (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp -

5.5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tidak dianggarkan baik di Tahun 2021 maupun di Tahun 2020.

Rincian mutasi nilai belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

Tabel 14. Mutasi Nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

Uraian	31Desember 2021
Saldo Awal per 1 Januari 2021 (a)	Rp -
Penambahan (b)	Rp -
Pengurangan (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp -

5.5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja modal aset tetap lainnya tidak dianggarkan baik di Tahun 2021 maupun di Tahun 2020.

Rincian mutasi nilai belanja modal aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel 15. Mutasi Nilai Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	31Desember 2021
Saldo Awal per 1 Januari 2021 (a)	Rp -
Penambahan (b)	Rp -
Pengurangan (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp -

5.5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja modal aset lainnya tidak dianggarkan baik di Tahun 2021 maupun di Tahun 2020.

Rincian mutasi nilai belanja modal aset lainnya sebagai berikut.

Tabel 16. Mutasi Nilai Belanja Modal Aset Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	31Desember 2021
Saldo Awal per 1 Januari 2021 (a)	Rp -
Penambahan (b)	Rp -
Pengurangan (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo per 31 Desember 2021 (a+(b-c))	Rp -

5.5.2.3. Surplus/Defisit Anggaran

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/Defisit Anggaran	(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit

APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp4.023.909.892,00) atau 96,51% sedangkan pada APBD 2020 juga mengalami defisit sebesar (Rp4.398.463.125,00).

5.5.2.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
SiLPA	(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA sebesar (Rp4.023.909.892,00).

Selain realisasi pendapatan dari APBD sebesar Rp0,00 dan realisasi belanja dari APBD sebesar Rp4.023.909.892,00, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dengan pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp543.578.000,00. Realisasi belanja sampai dengan akhir Tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp487.847.400,00 atau 89,75%.

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2021.

5.5.3.1. Aset

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67

Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.114.941.682,67 dan Rp4.251.171.205,67 atau terdapat penurunan sebesar 3,20%.

5.5.3.1.1. Aset Lancar

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lancar	0,00	0,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00

Tidak ada saldo kas di kas Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah karena kas di kas daerah tersebut tercatat pada PPKD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada SKPD.

5.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara pengeluaran pada SKPD.

5.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di BLUD	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo kas di BLUD pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di Bendahara BOS	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Tidak ada saldo kas di Bendahara BOS pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo kas yang dibatasi penggunaannya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.7 Kas Lainnya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Tidak ada saldo kas lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Pendapatan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Piutang Pendapatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Piutang Pajak pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.8.3 Piutang Lain lain PAD yang Sah

Piutang Lain lain PAD yang Sah Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Piutang Lain lain PAD yang Sah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.8.4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.8.5 Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Piutang Pendapatan Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.9 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Piutang Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.9.1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.9.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada saldo Penyisihan Piutang pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.1.11 Beban Dibayar di Muka

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Dibayar di Muka	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2021 yang belum menjadi beban pada periode TA 2021 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.12 Persediaan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Persediaan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Investasi Jangka Panjang	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.2.1 Investasi Permanen

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Investasi Permanen	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Permanen pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2021	31 Desember 2011
Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
	3.871.179.466,00	3.967.877.739,00

Aset Tetap milik Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.871.179.466,00 dan Rp3.967.877.739,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 17. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

Nama Akun	Saldo 31 Des 2020	Mutasi 2021		Saldo 31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.433.349.132,00	122.626.400,00	0,00	2.555.975.532,00
Gedung dan Bangunan	4.718.768.851,00	0,00	0,00	4.718.768.851,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.214.240.244,00)	(219.324.673,00)	0,00	(3.433.564.917,00)
Jumlah	3.967.877.739,00	(96.698.273,00)	0,00	3.871.179.466,00

5.5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tetap Tanah	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2021	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Mutasi dari OPD lain	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	0,00
Pengurangan:	0,00
- Penghapusan karena penjualan	0,00
- Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	0,00
- Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	0,00
- Mutasi ke OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	0,00
Saldo Akhir	0,00

5.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(Rp)	(Rp)
	2.555.975.532,00	2.433.349.132,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp2.555.975.532,00 dan Rp2.433.349.132,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	2.433.349.132,00
Penambahan	122.626.400,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2021	122.626.400,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	0,00
- Kurang Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Pengurangan	0,00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	0,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	0,00
- Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	0,00
- Setoran karena temuan	0,00
- Lebih Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	2.555.975.532,00

5.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	4.718.768.851,00	4.718.768.851,00

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp4.718.768.851,00 dan Rp4.718.768.851,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	4.718.768.851,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2020	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	0,00
- Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset lain-lain	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	0,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	0,00
- Penjualan	0,00
- Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

Uraian	Nilai (Rp)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	0,00
- Setoran pengembalian	0,00
- Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	0,00
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	4.718.768.851,00

Tabel 21. Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Nama Akun	Saldo 31 Des 2020	Mutasi 2021		Saldo 31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Bangunan Gedung Kantor	513.378.000,00	0,00	0,00	513.378.000,00
Bangunan Gedung Laboratorium	295.605.400,00	0,00	0,00	295.605.400,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	290.694.000,00	0,00	0,00	290.694.000,00
Tugu	197.600.000,00	0,00	0,00	197.600.000,00
Tugu/Tanda Batas Administrasi	3.421.491.451,00	0,00	0,00	3.421.491.451,00
Akumulasi Penyusutan	(951.644.489,00)	(93.867.409,00)	0,00	(1.045.511.898,00)
Jumlah	3.767.124.362,00	(93.867.409,00)	0,00	3.673.256.953,00

5.5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2021	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan (dari KDP)	0,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Jarijar dari Dana Bos (Reklas dari Peralatan dan mesin)	0,00
- Mutasi dari OPD lain	0,00
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Mutasi ke OPD lain	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	0,00

5.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp30.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	30.000.000,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2020	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Perolehan Aset dari Hutang	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Beban Hibah	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	0,00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	0,00
- Reklasifikasi ke Aset lain-lain	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	30.000.000,00

5.5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Mutasi Aset KDP

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2021	0,00
- Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
Pengurangan:	0,00
- Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	0,00
- Reklasifikasi Ke Aset Tetap	0,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
- Penghapusan	0,00
Saldo Akhir	0,00

5.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(3.433.564.917,00)	(3.214.240.244,00)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

**LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp3.433.564.917,00) dan (Rp3.214.240.244,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2020	Mutasi 2021		31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(2.262.595.755,00)	(125.457.264,00)	(0,00)	(2.388.053.019,00)
Gedung dan Bangunan	(951.644.489,00)	(93.867.409,00)	(0,00)	(1.045.511.898,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah	(3.214.240.244,00)	(219.324.673,00)	(0,00)	(3.433.564.917,00)

5.5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp2.388.053.019,00) dan (Rp2.262.595.755,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(2.262.595.755,00)
Penambahan:	(125.457.264,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2021	(125.457.264,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Kurang catat saldo awal	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Pengurangan:	0,00
- Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Lebih catat saldo awal	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(2.388.053.019,00)

5.5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp1.045.511.898,00) dan (Rp951.644.489,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(951.644.489,00)
Penambahan:	(93.867.409,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2021	(93.867.409,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Pengurangan:	0,00
- Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(1.045.511.898,00)

5.5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(0,00)
Penambahan:	0,00
- Beban Penyusutan Tahun 2021	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	0,00
Pengurangan:	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	0,00
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(0,00)

5.5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(0,00)
Penambahan:	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Pengurangan:	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(0,00)

5.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	243.762.216,67	283.293.466,67

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp243.762.216,67 dan Rp283.293.466,67. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

5.5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada Saldo Tagihan Jangka Panjang baik di Tahun 2021 maupun di Tahun 2020.

5.5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga baik di Tahun 2021 maupun di Tahun 2020.

5.5.3.1.4.3. Aset Tidak Berwujud (Netto)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tak Berwujud	(Rp)	(Rp)
	0,00	39.531.250,00

Saldo Aset Tidak Berwujud tersebut merupakan Aset Tidak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Rincian Aset Tidak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2020 (Rp) <i>Audited</i>	1 Jan 2021 (Rp) <i>Aplikasi</i>	Mutasi 2021		31 Des 2021 (Rp)
			Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	220.500.000,00	220.500.000,00	0,00	0,00	220.500.000,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(180.968.750,00)	(184.562.500,00)	(35.937.500,00)	0,00	(220.500.000,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	39.531.250,00	35.937.500,00	(35.937.500,00)	0,00	0,00

Terdapat selisih pada saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - *Software* akibat peralihan metode perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud dari manual ke aplikasi sebesar Rp3.593.750,00.

5.5.3.1.4.3.1 Aset Tidak Berwujud (Bruto)

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp220.500.000,00 dan Rp220.550.000,00. Atas saldo per 31 Desember 2021 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 31. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	220.500.000,00
Penambahan:	0,00
- Belanja TA 2020	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Kurang Catat Saldo Awal	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir	220.500.000,00

Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari :

Tabel 32. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	220.500.000,00	220.500.000,00
Kajian	0,00	0,00
Jumlah	220.500.000,00	220.500.000,00

5.5.3.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp220.500.000,00) dan (Rp180.968.750,00).

Tabel 33. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(180.968.750,00)
Penambahan:	(39.531.250,00)
- Beban Amortisasi Tahun 2021	(35.937.500,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	(3.593.750,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
- Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	(0,00)
Pengurangan:	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(220.500.000,00)

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 34. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

5.5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	243.762.216,67	243.762.216,67

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp243.762.216,67 (nilai buku) dan Rp243.762.216,67 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 35. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	859.524.820,00	859.524.820,00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(615.762.603,33)	(615.762.603,33)
Aset Lain-lain (Netto)	243.762.216,67	243.762.216,67

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp859.524.820,00 dengan Akumulasi Penyusutan.

5.5.3.2 Kewajiban

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kewajiban	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kewajiban Jangka Pendek	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan PFK

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Diterima di Muka	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3 Utang Beban

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Beban	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Beban pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3.1. Utang Beban Pegawai

Saldo Utang Beban Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3.2. Utang Beban Barang dan Jasa

Saldo Utang Beban Barang Jasa pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3.3. Utang Beban Hibah

Saldo Utang Beban Hibah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3.4. Utang Beban Transfer

Saldo Utang Beban Transfer pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3.5. Utang Beban Lain-lain

Saldo Utang Beban Lain-lain pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.3 Ekuitas

5.5.3.3.1 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67

Saldo Ekuitas pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.114.941.682,67.

5.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan pajak pada LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada LO sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2020 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2021. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan LO melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

5.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

5.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah -LO	2021 (Rp)	2020(Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38. Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 39. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	0,00	0,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang Sah – LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	9.251.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 sebesar Rp0,00 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah – LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	9.251.000,00

Pendapatan Hibah-LO pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp9.251.000,00.

5.5.4.1.3.2 Dana Darurat - LO

Dana Darurat - LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Dana Darurat-LO pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan-LO pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2 Beban

Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	4.156.545.665,00	4.694.475.302,00

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp4.156.545.665,00 dan Rp4.694.475.302,00.

5.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	108.120.000,00	1.681.265.000,00

Beban Pegawai untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp108.120.000,00 dan Rp1.681.265.000,00. Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai – LO terdiri dari Beban Honorarium.

5.5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	2.793.163.492,00	2.717.198.125,00

Beban Barang dan Jasa untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp2.793.163.492,00 dan Rp2.717.198.125,00.

5.5.4.2.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Subsidi untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	1.000.000.000,00	0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp0,00, Beban hibah berupa Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.000.000.000,00, sebagai mana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 41. Beban Hibah

Uraian	2020 (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00

5.5.4.2.5 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	219.324.673,00	252.887.177,00

Beban Penyusutan Tahun 2021 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp219.324.673,00. Rincian Beban Penyusutan tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 42. Beban Penyusutan

Uraian	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	125.457.264,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.617.970,00
Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.197.200,00
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	6.861.473,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	196.251,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	700.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	774.750,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	3.978.650,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	10.319.600,00
Beban Penyusutan Komputer Jaringan	8.306.250,00
Beban Penyusutan Personal Computer	53.111.136,00
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	10.575.575,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	8.818.409,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	93.867.409,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	10.267.560,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	5.912.108,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.813.880,00
Beban Penyusutan Tugu	3.952.000,00
Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	67.921.061,00
Jumlah	219.324.673,00

5.5.4.2.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	35.937.500,00	43.125.000,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 berupa nilai amortisasi Software selama periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp35.937.500,00. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 43. Beban Amortisasi

Uraian	2021 (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	35.937.500,00
Jumlah	35.937.500,00

5.5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 44. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	0,00	9.251.000,00
Beban	4.156.545.665,00	4.694.475.302,00
Surplus/Defisit dari Operasi	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)

5.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 45. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Defisit penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00

5.5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 adalah sebesar (Rp4.156.545.665,00)

5.5.4.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 terdiri dari :

5.5.4.6.1 Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Beban Tak Terduga pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4.7 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar (Rp4.156.545.665,00) dan (Rp4.685.224.302,00).

5.5.4.8 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar (Rp4.156.545.665,00) dan (Rp4.685.224.302,00).

5.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp4.114.941.682,67.

EKUITAS AWAL	4.251.171.205,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.156.545.665,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(3.593.750,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.023.909.892,00
EKUITAS AKHIR	4.114.941.682,67

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	4.251.171.205,67	4.546.899.223,67

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2021 adalah Rp4.251.171.205,67.

5.5.5.2 Surplus/Defisit-LO

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar (Rp4.156.545.665,00).

5.5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(3.593.750,00)	(8.966.841,00)

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp3.593.750,00). Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 46. Koreksi Ekuitas Lainnya

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Koreksi Saldo Akumulasi Aset Tetap	(3.593.750,00)	(8.966.841,00)
	Jumlah	(3.593.750,00)	(8.966.841,00)

5.5.5.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	4.023.909.892,00	4.398.463.125,00

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.023.909.892,00. Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan ini adalah sebesar nilai realisasi anggaran pada tahun yang bersangkutan.

5.5.5.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67

Nilai Ekuitas Akhir pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.114.941.682,67. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.6 Penjelasan Informasi Non Keuangan

- Tidak Ada -

5.7 Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

- Tidak Ada -

5.8 Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

LAPORAN KEUANGAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021
disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan per 31 Desember 2021
6. Berita Acara Rekonsiliasi Aset per 31 Desember 2021
7. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan per 31 Desember 2021
8. Lain – lain yang dianggap perlu.

1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (LRA)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Bidang Pemerintahan : 4.01		Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi : 4.01.01		Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	4.169.225.750,00	4.023.909.892,00	96,51	4.398.463.125,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.037.468.550,00	3.901.283.492,00	96,63	4.398.463.125,00
5.1.1	Belanja Pegawai	109.680.000,00	108.120.000,00	98,58	1.681.265.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.927.788.550,00	2.793.163.492,00	95,40	2.717.198.125,00
5.1.5	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	131.757.200,00	122.626.400,00	93,07	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.757.200,00	122.626.400,00	93,07	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)	96,51	(4.398.463.125,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(4.169.225.750,00)	(4.023.909.892,00)	96,51	(4.398.463.125,00)

Palangkaraya, 31 Desember 2021
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah				
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.01		Sekretariat Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.01 . 01		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
KODEREKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	
			s/ d PERIODE LALU	PERIODE INI		
5	BELANJA DAERAH	4.169.225.750,00	0,00	4.023.909.892,00	4.023.909.892,00	
5.1	BELANJA OPERASI	4.037.468.550,00	0,00	3.901.283.492,00	3.901.283.492,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	109.680.000,00	0,00	108.120.000,00	108.120.000,00	
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	109.680.000,00	0,00	108.120.000,00	108.120.000,00	
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	109.680.000,00	0,00	108.120.000,00	108.120.000,00	
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	93.360.000,00	0,00	93.360.000,00	93.360.000,00	
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	0,00	14.760.000,00	14.760.000,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.927.788.550,00	0,00	2.793.163.492,00	2.793.163.492,00	
5.1.2.01	Belanja Barang	393.624.950,00	0,00	381.764.625,00	381.764.625,00	
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	393.624.950,00	0,00	381.764.625,00	381.764.625,00	
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	92.269.500,00	0,00	92.080.625,00	92.080.625,00	
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.424.000,00	0,00	49.249.100,00	49.249.100,00	
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	134.861.750,00	0,00	134.811.200,00	134.811.200,00	
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.120.000,00	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.640.000,00	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00	
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.017.500,00	0,00	77.091.500,00	77.091.500,00	
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.292.200,00	0,00	9.292.200,00	9.292.200,00	
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.304.678.000,00	0,00	1.198.617.537,00	1.198.617.537,00	
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.233.046.000,00	0,00	1.143.930.233,00	1.143.930.233,00	
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.600.000,00	0,00	25.450.000,00	25.450.000,00	
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	221.350.000,00	0,00	201.200.000,00	201.200.000,00	
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	888.960.000,00	0,00	822.000.000,00	822.000.000,00	
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	31.980.000,00	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	62.450.000,00	0,00	61.932.133,00	61.932.133,00	
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	706.000,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	0,00	1.548.100,00	1.548.100,00	(451.900,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.032.000,00	0,00	36.587.304,00	36.587.304,00	(9.444.696,00)
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.032.000,00	0,00	36.587.304,00	36.587.304,00	(9.444.696,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.600.000,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	(5.000.000,00)
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	33.803.000,00	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00	(3.000,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.803.000,00	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00	(3.000,00)
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	23.803.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	(3.000,00)
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	1.190.682.600,00	0,00	1.173.981.330,00	1.173.981.330,00	(16.701.270,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.190.682.600,00	0,00	1.173.981.330,00	1.173.981.330,00	(16.701.270,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.178.242.600,00	0,00	1.171.200.080,00	1.171.200.080,00	(7.042.520,00)
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.440.000,00	0,00	2.781.250,00	2.781.250,00	(9.658.750,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	131.757.200,00	0,00	122.626.400,00	122.626.400,00	(9.130.800,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.757.200,00	0,00	122.626.400,00	122.626.400,00	(9.130.800,00)
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	15.000.000,00	0,00	11.660.000,00	11.660.000,00	(3.340.000,00)
5.2.2.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	15.000.000,00	0,00	11.660.000,00	11.660.000,00	(3.340.000,00)
5.2.2.08.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	15.000.000,00	0,00	11.660.000,00	11.660.000,00	(3.340.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	116.757.200,00	0,00	110.966.400,00	110.966.400,00	(5.790.800,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	84.757.200,00	0,00	79.883.000,00	79.883.000,00	(4.874.200,00)
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	84.757.200,00	0,00	79.883.000,00	79.883.000,00	(4.874.200,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.000.000,00	0,00	31.083.400,00	31.083.400,00	(916.600,00)
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	(325.000,00)
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	30.000.000,00	0,00	29.408.400,00	29.408.400,00	(591.600,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(4.169.225.750,00)	0,00	(4.023.909.892,00)	(4.023.909.892,00)	145.315.858,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.169.225.750,00)	0,00	(4.023.909.892,00)	(4.023.909.892,00)	145.315.858,00

2

NERACA



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.555.975.532,00	2.433.349.132,00
Gedung dan Bangunan	4.718.768.851,00	4.718.768.851,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.433.564.917,00)	(3.214.240.244,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.871.179.466,00	3.967.877.739,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	220.500.000,00	220.500.000,00
Aset Lain-lain	243.762.216,67	243.762.216,67
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(220.500.000,00)	(180.968.750,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	243.762.216,67	283.293.466,67

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67

3

**LAPORAN OPERASIONAL
(LO)**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4.01		Sekretariat Daerah				
Unit Organisasi : 4.01.01		Sekretariat Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)	
KEGIATAN OPERASIONAL						
7	PENDAPATAN - LO	0,00	9.251.000,00	(9.251.000,00)	(100,00)	
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	9.251.000,00	(9.251.000,00)	(100,00)	
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	9.251.000,00	(9.251.000,00)	(100,00)	
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	BEBAN	4.156.545.665,00	4.694.475.302,00	(537.929.637,00)	(11,46)	
8.1.1	Beban Pegawai	108.120.000,00	1.681.265.000,00	(1.573.145.000,00)	(93,57)	
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.793.163.492,00	2.717.198.125,00	75.965.367,00	2,80	
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.5	Beban Hibah	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	125.457.264,00	159.019.767,00	(33.562.503,00)	(21,11)	
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	93.867.409,00	93.867.410,00	(1,00)	0,00	
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	35.937.500,00	43.125.000,00	(7.187.500,00)	(16,67)	

4

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah		
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	4.251.171.205,67	4.546.899.223,67
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.156.545.665,00)	(4.685.224.302,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(3.593.750,00)	(8.966.841,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	4.023.909.892,00	4.398.463.125,00
EKUITAS AKHIR	4.114.941.682,67	4.251.171.205,67

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah


Dis. HUSNAD HUSAIN, M.Si
NIP. 19690806 198911 1 002

5

BERITA ACARA
REKONSILIASI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI APBD DAN ASET TETAP
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun **2022** yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah mengadakan Rekonsiliasi Data Realisasi APBD dan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, keadaan sampai dengan bulan **Desember 2021** dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Keterangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
1.	Realisasi SP2D	Rp 4.175.491.251,00	Rp 4.175.491.251,00	Lampiran 2
2.	Realisasi Pendapatan	Rp -	Rp -	Lampiran 3
3.	Realisasi Belanja Operasi	Rp 3.901.283.492,00	Rp 3.901.283.492,00	Lampiran 3
4.	Realisasi Belanja Modal	Rp 122.626.400,00	Rp 122.626.400,00	Lampiran 3
5.	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -	Lampiran 3

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah :



RIZALI HADI

SEKRETARIAT DAERAH

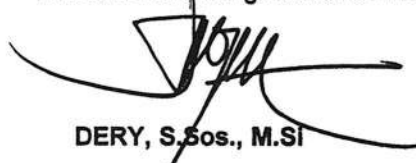
Biro Umum :

1. Kasubbag Keuangan dan Verifikasi Setda :



HARY LISTYAWAN, S.E.

2. Bendahara Pengeluaran SETDA :



DERY, S.Sos., M.Si

REKAPITULASI : REALISASI BELANJA PENGELUARAN APBD PROVINSI KALTENG TA. 2020
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 Desember 2021

NO URUT	NAMA SKPD	REALISASI SP2D				DI-SPJ-KAN	SETORAN		SISA PADA KAS BEND.	PA	KAS
		LS	UP	GU	TU		LS	UP / GU/ TU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biro Organisasi											
1	Januari	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Februari	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Maret	Rp	160.013.350,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
TOTAL TRIWULAN I		Rp	160.013.350,00	Rp	211.102.357,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	April	Rp	71.381.675,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Mei	Rp	159.881.675,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Juni	Rp	371.381.675,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
TOTAL TRIWULAN II		Rp	602.645.025,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Juli	Rp	169.631.675,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Agustus	Rp	97.468.609,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	September	Rp	160.210.209,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
TOTAL TRIWULAN III		Rp	427.310.493,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Oktober	Rp	638.106.209,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	November	Rp	158.896.209,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Desember	Rp	415.788.668,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
TOTAL TRIWULAN IV		Rp	1.212.791.086,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
TOTAL		Rp	2.402.769.954,00	Rp	1.537.731.297,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-

Catatan :

REALISASI BELANJA APBD
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran

I. PENDAPATAN

- Pendapatan Retribusi	Rp	-
	Rp	-
JUMLAH	<u>Rp</u>	<u>-</u>

II. BELANJA

a. BELANJA OPERASI

- Belanja Pegawai	Rp	108.120.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.793.163.492,00
- Belanja Hibah	Rp	1.000.000.000,00
JUMLAH (a)	<u>Rp</u>	<u>3.901.283.492,00</u>

b. BELANJA MODAL

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	122.626.400,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	-
JUMLAH (b)	<u>Rp</u>	<u>122.626.400,00</u>
JUMLAH (a + b)	<u>Rp</u>	<u>4.023.909.892,00</u>

III. SALDO

- SALDO UP/TU/GU	Rp	-
JUMLAH TOTAL (a + b + c)	<u>Rp</u>	<u>4.023.909.892,00</u>

Catatan:

1 Pengurang Belanja	Rp	2.337.500,00
2 SPP dan SPM terbit dibulan Desember 2021	Rp	-
3 Setoran Saldo Nihil	<u>Rp</u>	<u>149.243.859,00</u>
	Rp	151.581.359,00
TOTAL SP2D	<u>Rp</u>	<u>4.175.491.251,00</u>

REKAPITULASI SP2D
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

NO	BULAN	NILAI SP2D (Rp)		STATUS	KETERANGAN			
		SETDA	BADAN KEU. DAN ASET DAERAH		UP	GU	TU	LS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Januari	Rp -	Rp -	sama	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2.	Februari	Rp 235.000.000,00	Rp 235.000.000,00	sda	Rp 235.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
3.	Maret	Rp 371.115.707,00	Rp 371.115.707,00	sda	Rp -	Rp 211.102.357,00	Rp -	Rp 160.013.350,00
4.	April	Rp 284.997.237,00	Rp 284.997.237,00	sda	Rp -	Rp 213.615.562,00	Rp -	Rp 71.381.675,00
5.	Mei	Rp 159.881.675,00	Rp 159.881.675,00	sda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 159.881.675,00
6.	Juni	Rp 521.892.825,00	Rp 521.892.825,00	sda	Rp -	Rp 150.511.150,00	Rp -	Rp 371.381.675,00
7.	Juli	Rp 400.376.720,00	Rp 400.376.720,00	sda	Rp -	Rp 230.745.045,00	Rp -	Rp 169.631.675,00
8.	Agustus	Rp 276.143.075,00	Rp 276.143.075,00	sda	Rp -	Rp 178.674.466,00	Rp -	Rp 97.468.609,00
9.	September	Rp 160.210.209,00	Rp 160.210.209,00	sda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 160.210.209,00
10.	Oktober	Rp 850.894.581,00	Rp 850.894.581,00	sda	Rp -	Rp 212.788.372,00	Rp -	Rp 638.106.209,00
11.	November	Rp 331.809.784,00	Rp 331.809.784,00	sda	Rp -	Rp 172.913.575,00	Rp -	Rp 158.896.209,00
12.	Desember	Rp 583.169.438,00	Rp 583.169.438,00	sda	Rp -	Rp 167.380.770,00	Rp -	Rp 415.788.668,00
JUMLAH		Rp 4.175.491.251,00	Rp 4.175.491.251,00	-	Rp 235.000.000,00	Rp 1.537.731.297,00	Rp -	Rp 2.402.759.954,00

REALISASI BELANJA APBD
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

Berdasarkan Surat Pertanggung Jawaban

I. PENDAPATAN

- Pendapatan Retribusi

	Rp	-
	Rp	-
JUMLAH	Rp	-

II. BELANJA**a. BELANJA OPERASI**

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Hibah

	Rp	108.120.000,00
	Rp	2.793.163.492,00
	Rp	1.000.000.000,00
JUMLAH (a)	Rp	3.901.283.492,00

b. BELANJA MODAL

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Rp	122.626.400,00
	Rp	-
	Rp	-
JUMLAH (b)	Rp	122.626.400,00
JUMLAH (a + b)	Rp	4.023.909.892,00

III. SALDO

- SALDO UP/TU/GU

JUMLAH TOTAL

(a + b + c)	Rp	4.023.909.892,00
-------------	----	------------------

Catatan :

- 1 Setoran Pengembalian Perjalanan Dinas a.n Ardiansyah dkk tanggal 1 Desember 2021
- 2 Setoran Saldo Nihil/ Sisa UP

Rp 2.337.500,00

Rp 149.243.859,00

TOTAL SP2D

	Rp	151.581.359,00
	Rp	4.175.491.251,00

REKON BELANJA LRA DAN BEBAN LO
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

NO.	BELANJA LRA	JUMLAH Rp.	BEBAN LO	JUMLAH Rp.	SELISIH Rp.	KETERANGAN SELISIH
1.	Belanja Pegawai	Rp 108.120.000,00 ✓	1. Beban Pegawai	Rp 108.120.000,00 ✓	Rp -	-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.793.163.492,00 ✓	2. Beban Barang dan Jasa	Rp 2.793.163.492,00 ✓	Rp -	-
3.	Belanja Bunga	Rp -	3. Beban Bunga	Rp -	Rp -	
4.	Belanja Subsidi	Rp -	4. Beban Subsidi	Rp -	Rp -	
5.	Belanja Hibah	Rp 1.000.000.000,00	5. Beban Hibah	Rp 1.000.000.000,00	Rp -	
6.	Belanja Bantuan Sosial	Rp - ✓	6. Beban Bantuan Sosial	Rp - ✓	Rp -	
7.	Belanja Tidak Terduga	Rp -	7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp -	Rp -	
			8. Beban Penyisihan Piutang	Rp -	Rp -	
			9. Beban Lain - Lain	Rp -	Rp -	
			10. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp -	Rp -	
			11. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -	
			12. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	Rp -	
			13. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp -	Rp -	
			14. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp -	Rp -	
			15. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Rp -	Rp -	
			16. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Rp -	Rp -	
		Rp 3.901.283.492,00 ✓		Rp 3.901.283.492,00	Rp -	

Catatan:

REKON PENDAPATAN LRA DAN PENDAPATAN LO
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

NO.	PENDAPATAN LRA	JUMLAH Rp.	PENDAPATAN LO	JUMLAH Rp.	SELISIH Rp.	KETERANGAN SELISIH
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA		A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO			
1.	Pendapatan Pajak Daerah	Rp	1. Pendapatan Pajak Daerah - LO	Rp	Rp	
2.	Hasil Retribusi Daerah	Rp	2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp	Rp	
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Rp	Rp	
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	4. lain-lain PAD Yang Sah	Rp	Rp	
			B. PENDAPATAN TRANSFER - LO			
			1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	Rp	Rp	
			2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	Rp	Rp	
			3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO	Rp	Rp	
			4. Bantuan Keuangan - LO	Rp	Rp	
			C. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO			
			1. Pendapatan Hibah - LO	Rp	Rp	
			2. Dana Darurat - LO	Rp	Rp	
			3. Pendapatan Lainnya - LO	Rp	Rp	
		Rp				

REKON BELANJA MODAL DAN ASET
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

NO. Rekening	BELANJA -LRA	JUMLAH Rp.	ASET	JUMLAH	SELISIH Rp.	KETERANGAN SELISIH
5 . 2 . 2 . 08 . 01 . 0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	Rp 11.660.000,00	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	Rp 11.660.000,00	Rp -	
5 . 2 . 2 . 10 . 01 . 0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp 79.883.000,00	Personal Computer	Rp 79.883.000,00	Rp -	
5 . 2 . 2 . 10 . 02 . 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 1.675.000,00	Peralatan Personal Computer	Rp 1.675.000,00	Rp -	
5 . 2 . 2 . 10 . 02 . 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp 29.408.400,00	Peralatan Komputer Lainnya	Rp 29.408.400,00	Rp -	
		Rp 122.626.400,00		Rp 122.626.400,00	Rp -	

KERTAS KERJA BELANJA LRA DAN BEBAN LO
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2021

	URAIAN	LRA DAN LO				NERACA	
		BELANJA LRA	BEBAN LO	SELISIH	KETERANGAN	AKUN	NILAI
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 93.360.000,00 ✓	Rp 93.360.000,00	Rp -			
5.1.1.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 14.760.000,00 ✓	Rp 14.760.000,00	Rp -			
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	Rp 108.120.000,00	Rp 108.120.000,00	Rp -			
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp 92.080.625,00 ✓	Rp 92.080.625,00				
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 49.249.100,00 ✓	Rp 49.249.100,00				
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 134.811.200,00 ✓	Rp 134.811.200,00				
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp 12.120.000,00 ✓	Rp 12.120.000,00				
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan	Rp 7.120.000,00 ✓	Rp 7.120.000,00				
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 77.091.500,00 ✓	Rp 77.091.500,00				
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 9.292.200,00 ✓	Rp 9.292.200,00				
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,	Rp 25.450.000,00 ✓	Rp 25.450.000,00				
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 201.200.000,00 ✓	Rp 201.200.000,00				
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 822.000.000,00 ✓	Rp 822.000.000,00				
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 31.800.000,00 ✓	Rp 31.800.000,00				
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 61.932.133,00 ✓	Rp 61.932.133,00				

KERTAS KERJA BELANJA LRA DAN BEBAN LO

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2021

	URAIAN	LRA DAN LO				NERACA	
		BELANJA LRA	BEBAN LO	SELISIH	KETERANGAN	AKUN	NILAI
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 1.548.100,00 ✓	Rp 1.548.100,00				
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 36.587.304,00 ✓	Rp 36.587.304,00				
5.1.2.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp 2.000.000,00 ✓	Rp 2.000.000,00				
5.1.2.03.02.0409	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 13.600.000,00 ✓	Rp 13.600.000,00				
5.1.2.03.02.0401	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 2.500.000,00 ✓	Rp 2.500.000,00				
5.1.2.03.02.0440	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp 23.800.000,00 ✓	Rp 23.800.000,00				
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	Rp 4.160.000,00 ✓	Rp 4.160.000,00				
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Komputer Lainnya	Rp 5.840.000,00 ✓	Rp 5.840.000,00				
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 1.171.200.080,00 ✓	Rp 1.171.200.080,00				
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2.781.250,00 ✓	Rp 2.781.250,00				
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp 5.000.000,00 ✓	Rp 5.000.000,00				
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA		Rp 2.793.163.492,00	Rp 2.793.163.492,00				
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela	Rp 1.000.000.000,00 ✓	Rp 1.000.000.000,00	Rp -			
JUMLAH BELANJA HIBAH		Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00	Rp -			
JUMLAH BELANJA		Rp 3.901.283.492,00	Rp 3.901.283.492,00				



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Bendahara Pengeluaran : RIZALI HADI
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	BULAN LALU		BULAN INI		s.d. BULAN INI		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
					SPJ - LS Gaji					
SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ - UP/GU/TU								
5 . 1 . 1 . 24 . 01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	93.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.360.000,00	0,00	0,00	
			70.020.000,00	23.340.000,00		93.360.000,00				
			0,00		0,00	0,00				
5 . 1 . 1 . 24 . 02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14.760.000,00	9.240.000,00	
			12.720.000,00		2.040.000,00					
			0,00			0,00				
5 . 1 . 4 . 13 . 01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
			800.000.000,00		200.000.000,00					
			0,00			0,00				
5 . 2 . 1 . 01 . 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	83.161.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.528.750,00	(8.919.125,00)	
			0,00		2.528.750,00					
			86.514.875,00		3.037.000,00		89.551.875,00			
5 . 2 . 1 . 01 . 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	45.697.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	49.249.100,00	(3.552.100,00)	
			0,00			0,00				
			48.109.100,00		1.140.000,00		49.249.100,00			
5 . 2 . 1 . 01 . 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	226.970.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	134.811.200,00	92.159.300,00	
			0,00			0,00				
			131.709.700,00		3.101.500,00		134.811.200,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI		s.d. BULAN INI		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
				SPJ - LS Gaji		s.d. BULAN INI			
				SPJ - LS Barang & Jasa					
				SPJ - UP/GU/TU					
5 . 2 . 1 . 01 . 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120.000,00 ✓	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			12.120.000,00		0,00		12.120.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120.000,00	(3.480.000,00)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.120.000,00		0,00		7.120.000,00 ✓		
5 . 2 . 1 . 01 . 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.091.500,00 ✓	47.563.500,00
			0,00	0,00	13.972.500,00		13.972.500,00		
			51.471.500,00		11.647.500,00		63.119.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.362.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.200,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9.292.200,00		0,00		9.292.200,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450.000,00	10.050.000,00
			25.450.000,00		0,00		25.450.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	361.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200.000,00	160.250.000,00
			201.200.000,00		0,00		201.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	47.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	888.960.000,00	0,00	0,00	142.400.000,00		822.000.000,00	822.000.000,00	66.960.000,00
			679.600.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 04 . 33	Belanja Jasa Tenaga Supir	31.980.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00		31.800.000,00	31.800.000,00	180.000,00
			26.500.000,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU		BULAN INI		s.d. BULAN INI		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
					SPJ - LS Gaji					
					SPJ - LS Barang & Jasa					
					SPJ - UP/GU/TU					
5 . 2 . 1 . 04 . 63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.932.133,00	(18.732.133,00)	
5 . 2 . 1 . 04 . 64	Belanja Paket/Pengiriman	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.932.133,00	3.706.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 1 . 04 . 67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.100,00	2.451.900,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 05	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587.304,00	9.444.696,00	
			30.254.886,00	6.332.418,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 1 . 07 . 36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 07 . 23	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 1 . 08 . 09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 08 . 30	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 . 2 . 1 . 15 . 01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	BULAN LALU		BULAN INI		s.d. BULAN INI			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji								
			SPJ - LS Barang & Jasa								
			SPJ - UP/GU/TU								
5 . 2 . 1 . 19 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	26.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	3.003.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00			
5 . 2 . 1 . 19 . 05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00			
5 . 2 . 1 . 19 . 11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00			
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.082.765.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.200.080,00	(88.434.480,00)	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.093.639.359,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00			
			1.093.639.359,00	57.685.721,00	57.685.721,00	57.685.721,00	57.685.721,00	1.151.325.080,00			
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781.250,00	28.598.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.343.750,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	437.500,00	2.781.250,00			
5 . 2 . 1 . 26 . 01	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			
5 . 2 . 3 . 22 . 05	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660.000,00	3.340.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			11.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660.000,00			
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Personal Computer	60.757.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883.000,00	(19.125.800,00)	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			79.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.883.000,00			
5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	325.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****REGISTER SP2D**

Periode : 01-January-2021 s/d 31-December-2021

Urusan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	TANGGAL	NO. SP2D	JENIS SPM	URAIAN	NILAI SP2D
1	18/02/2021	00021/SP2D/UP/2021	Uang Persediaan (UP)	Permintaan SPP Uang Persediaan (UP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir	235.000.000,00
2	10/03/2021	00144/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Januari 2021.Seperti SPP Terlampir	71.381.675,00
3		00145/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Februari 2021.Seperti SPP Terlampir	71.381.675,00
4	29/03/2021	00218/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggungjawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. Maret 2021.Seperti SPP Terlampir	211.102.357,00
5		00220/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Panitia penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam rangka Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2020 Keg Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.Seperti SPP Terlampir	17.250.000,00
6	07/04/2021	00301/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Maret 2021.Seperti SPP Terlampir	71.381.675,00
7	30/04/2021	00458/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. April 2021.Seperti SPP Terlampir	213.615.562,00
8	03/05/2021	00500/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. April 2021.Seperti SPP Terlampir	71.381.675,00
9	06/05/2021	00547/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Honorarium Penangung Jawaban Pengelola Keuangan (Honorarium Bendahara Pembantu, PPTK, KPA dan Pengadaan Barang dan Jasa) Pada Biro Pem dan Otonomi Daerah Setda Prov Kalteng u.b Januari s/d Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	48.900.000,00
10		00554/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Tim Honorarium Tim Penegasan Batas Daerah Pada Biro Pem dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kalteng. u.b Januari s/d Maret 2021 Keg. Fasilitas Penataan Wilayah.Seperti SPP Terlampir	39.600.000,00
11	02/06/2021	00709/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	150.511.150,00
12	04/06/2021	00781/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	71.381.675,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****REGISTER SP2D**

Periode : 01-January-2021 s/d 31-December-2021

Urusan : 4 : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : 4 . 01 : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	TANGGAL	NO. SP2D	JENIS SPM	URAIAN	NILAI SP2D
13	25/06/2021	0260/SP2D-NG/2021	Langsung (LS)	Biaya Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir	300.000.000,00
14	02/07/2021	01022/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	71.381.675,00
15	09/07/2021	01106/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Honorarium Tim Penyusunan, Kelompok Kerja Penyusunan, Tim, Revie dan Sekre Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Ringkasan Laporan Penyeleng Pemda TA 2020.Seperti SPP Terlampir	58.650.000,00
16		01108/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Honorarium Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.4/100/2021 Tgl 23 Maret 2021 Ub. April s/d Juni 2021 Pada Kegiatan Pemerintahan Kode 4.01.03.1.01.03.Seperti SPP Terlampir	39.600.000,00
17	13/07/2021	01134/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	230.745.045,00
18	04/08/2021	01343/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan GPS MAP (Biro Pemerintahan dan Otda).Seperti SPP Terlampir	11.660.000,00
19	16/08/2021	01524/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Penyediaan Peralatan Video Conference (Biro Pemerintahan dan Otda) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.Seperti SPP Terlampir	8.792.400,00
20	26/08/2021	01645/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	77.016.209,00
21	30/08/2021	01660/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. Agustus 2021.seperti SPP Terlampir	178.674.466,00
22	01/09/2021	01773/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pengadaan Komputer dan UPS Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor.Seperti SPP Terlampir	25.040.000,00
23	07/09/2021	01973/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	77.016.209,00
24	13/09/2021	02143/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pekerjaan PENGADAAN PERALATAN VIDEO CONFERENCE (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA)Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya.Seperti SPP Terlampir	20.616.000,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****REGISTER SP2D**

Periode : 01-January-2021 s/d 31-December-2021

Urusan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	TANGGAL	NO. SP2D	JENIS SPM	URAIAN	NILAI SP2D
25	13/09/2021	02144/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pekerjaan PENGADAAN KOMPUTER DAN UPS (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.Seperti SPP Terlampir	23.288.000,00
26		02145/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga (Biaya Pemalin Korsik) dalam Rangka HUT ke - 76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan.Seperti SPP Terlampir	5.000.000,00
27	21/09/2021	02264/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pekerjaan PENGADAAN KOMPUTER DAN UPS (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.Seperti SPP Terlampir	9.250.000,00
28	04/10/2021	02413/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.Seperti SPP Terlampir	77.016.209,00
29	07/10/2021	02494/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.Seperti SPP Terlampir	33.840.000,00
30	13/10/2021	02559/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran honorarium Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 188.44/259/2021 Tgl 09 JULI Ub. Juli s/d September 2021 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.Seperti SPP Terlampir	27.250.000,00
31		0988/SP2D/NG/2021	Langsung (LS)	Biaya Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Tahap II Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir	500.000.000,00
32	27/10/2021	02813/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	212.788.372,00
33	04/11/2021	03008/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. Oktober.Seperti SPP Terlampir	77.016.209,00
34	16/11/2021	03273/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. November 2021. Seperti SPP Terlampir	172.913.575,00
35	17/11/2021	03307/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tahun 2021 Nomor 188.44/259/2021 tgl 09 Juli 2021 Ub. Oktober s/d Desember Keg Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.Seperti SPP Terlampir	27.000.000,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****REGISTER SP2D**

Periode : 01-January-2021 s/d 31-December-2021

Urusan : 4 : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : 4 . 01 : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	TANGGAL	NO. SP2D	JENIS SPM	URAIAN	NILAI SP2D
36	18/11/2021	03314/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Honorarium Panitia, Narasumber dan Moderator Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov Kalteng Nomor 180/127/PEM-OTDA/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Keg. Fasilitas Kerja Sama Daerah.Seperti SPP Terlampir	17.300.000,00
37	23/11/2021	03426/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Pakat Rapat Fullday Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Potensi Kerja Sama Daerah Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah.Seperti SPP Terlampir	13.600.000,00
38	24/11/2021	03478/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pengadaan Komputer Laptop (Biro Pemerintahan dan OTDA).Seperti SPP Terlampir	23.980.000,00
39	06/12/2021	03769/SP2D/GU/2021	Ganti Uang Persediaan (GU)	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. November II 2021.Seperti SPP Terlampir	167.380.770,00
40		03776/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Supir dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Ub. November Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi.Seperti SPP Terlampir	77.016.209,00
41	10/12/2021	04021/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan (Honorarium Bendahara Pembantu, PPTK, KPA dan Pengadaan Barang dan Jasa) Pada Biro Pem dan Otonomi Daerah Setda Prov Kalteng u.b Oktober s/d Desember 2021.Seperti SPP Terlampir	25.380.000,00
42	15/12/2021	04237/SP2D/GU-NIHIL/2021	Nihil	Surat Pertanggung Jawaban Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah ub. Desember 2021.Seperti SPP Terlampir	85.756.141,00
43	21/12/2021	04434/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke Kab.Kapuas a.n. Drs. SYARIF HIDAYAT berdasarkan SPT Nomor : 094/185/III.3/PEM-OTDA dan SPPD Nomor : 094/343/SET/2021 tanggal 07 Desember 2021.Seperti SPP Terlampir	2.250.000,00
44		04436/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke Kab. Gunung Mas an. ANNA NORITHA, SE.M.Si dkk Berdasarkan SPT No. 094/182/I.1/PEM-OTDA & SPPD No.094/337,338,339,340,341/SET/2021 Tgl 7 Desember 2021. Seperti SPP Terlampir	5.125.000,00
45		04437/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke Kab. Sukmara a.n THOMAS SEGAH, ST dkk Berdasarkan SPT No. 094/181/II.3/PEM-OTDA & SPPD No. 094/334,335,336/SET/2021 tgl 3 Desember 2021.Seperti SPP Terlampir	9.300.000,00
46		04440/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke Kab.Sukamara a.n. DINA FITRIANI, S.Sos berdasarkan SPT Nomor : 094/184/III.1/PEM-OTDA dan SPPD Nomor : 094/342/SET/2021 tanggal 07 Desember 2021.Seperti SPP Terlampir	3.200.000,00
47	22/12/2021	04463/SP2D/LS/2021	Langsung (LS)	Pembayaran Biaya Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir	2.528.750,00

6

**BERITA ACARA
REKONSILIASI ASET
PER 31 DESEMBER 2021**

BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI APBD DAN ASET TETAP
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Tanggal Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah mengadakan Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, keadaan sampai dengan Bulan 31 Desember 2021 hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Kuasa Pengguna Barang)	Sekretariat Daerah (Pengguna Barang)	Keterangan
BELANJA MODAL				
1	Belanja Modal(LRA)	122.626.400,00	122.626.400,00	BA Rekon Keuangan
2	Belanja Modal (SPJ)	122.626.400,00	122.626.400,00	BA Rekon Aset
ASET TETAP				
1	Neraca Awal	7.182.117.983,00	7.182.117.983,00	Lampiran 3
2	Penambahan	122.626.400,00	122.626.400,00	Lampiran 3
3	Pengurangan	-	-	Lampiran 3
4	Neraca Akhir	7.304.744.383,00	7.304.744.383,00	Lampiran 3
5	Akumulasi Penyusutan	3.433.564.917,00	3.433.564.917,00	Lampiran 4
6	Nilai Buku	3.871.179.466,00	3.871.179.466,00	Lampiran 4
ASET LAINNYA				
1	Saldo Awal	1.080.024.820,00	1.080.024.820,00	Lampiran 3
2	Penambahan	-	-	Lampiran 3
3	Pengurangan	-	-	Lampiran 3
4	Saldo Akhir	1.080.024.820,00	1.080.024.820,00	Lampiran 3
5	Akumulasi Penyusutan	836.262.603,33	836.262.603,33	Lampiran 4
6	Nilai Buku	243.762.216,67	243.762.216,67	Lampiran 4
EKSTRAK COMPTABLE				
1	Saldo Awal	38.475.000,00	38.475.000,00	Lampiran 3
2	Penambahan	-	-	Lampiran 3
3	Pengurangan	-	-	Lampiran 3
4	Saldo Akhir	38.475.000,00	38.475.000,00	Lampiran 3

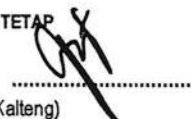
Mengetahui,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690806 198911 1 002

PETUGAS PELAKSANA REKONSILIASI ASET TETAP

1. MANDAT APRIYADY
(Pengurus Barang Pengguna Setda Prov. Kalteng)



2. YANDITHA CHRISTMAS, S. IP
(Pengurus Barang Pembantu)



REKAPITULASI SALDO AKHIR
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAMPIRAN 3

K E L O M P O K	JENIS	OBJEK	Uraian/ Nama Bidang Barang	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2021	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 30 Juni 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1		TANAH	-	-	-	-
		01	TANAH	-	-	-	-
3	2		PERALATAN DAN MESIN	2.433.349.132	122.626.400	-	2.555.975.532,00
		01	ALAT BESAR	-	-	-	-
		02	ALAT ANGKUTAN	701.405.358	-	-	701.405.358,00
		03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-
		04	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-
		05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	365.993.432	1.675.000	-	367.668.432,00
		06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	156.657.500	41.068.400	-	197.725.900,00
		07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-
		08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-
		09	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-
		10	KOMPUTER	-	-	-	-
		11	ALAT EKSPLORASI	1.189.312.842	79.883.000	-	1.269.195.842,00
		12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-
		16	ALAT PERAGA	-	-	-	-
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
		18	RAMBU - RAMBU	19.980.000	-	-	19.980.000,00
		19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	4.718.768.851	-	-	4.718.768.851,00
		01	BANGUNAN GEDUNG	1.099.677.400	-	-	1.099.677.400,00
		02	MONUMEN	395.200.000	-	-	395.200.000,00
		03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-
		04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3.223.891.451	-	-	3.223.891.451,00
3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-
		01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-
		02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-
		03	INSTALASI	-	-	-	-
		04	JARINGAN	-	-	-	-

K E L O M P O K	JENIS	OBJEK	Uraian/ Nama Bidang Barang	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2021	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 30 Juni 2021
3	5		ASET TETAP LAINNYA	30.000.000	-	-	30.000.000,00
		01	BAHAN PERPUSTAKAAN	30.000.000	-	-	30.000.000,00
		02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-	-	-
		03	HEWAN	-	-	-	-
		04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-
		05	TANAMAN	-	-	-	-
		06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-
		07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-
3	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
		01	TANAH	-	-	-	-
		02	PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-
		03	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-
		04	JALAN, JARINGAN DAN IIRIGASI	-	-	-	-
		05	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
			Jumlah 1	7.182.117.983	122.626.400	-	7.304.744.383,00
5			ASET LAINNYA	1.080.024.820	-	-	1.080.024.820
5	2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGAD/KELOLA PIHAK LAIN	-	-	-	-
	5.2.1.1		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGAD/KELOLA PIHAK LAIN	-	-	-	-
5	3	01	ASET TIDAK BERWUJUD	220.500.000	-	-	220.500.000
	5.3.1.1.	01	GOODWILL	-	-	-	-
	5.3.1.1.	02	LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-
	5.3.1.1.	03	HAK CIPTA	-	-	-	-
	5.3.1.1.	04	HAK PATEN	-	-	-	-
	5.3.1.1.	05	SOFTWARE	220.500.000	-	-	220.500.000
	5.3.1.1.	06	KAJIAN	-	-	-	-
	5.3.1.1.	07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	-	-	-	-
	5.3.1.1.	08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
	5.3.1.1.	09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-
5	4	01	ASET LAIN-LAIN	859.524.820	-	-	859.524.820
	5.4.1.1	01	A.ASET RUSAK BERAT/USANG	859.524.820	-	-	859.524.820
			1.KIB A	-	-	-	-
			2.KIB B	64.253.417	-	-	64.253.417
			3.KIB C	-	-	-	-
			4.KIB D	-	-	-	-
			5.KIB E	-	-	-	-
			B. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (TDK)	795.271.403	-	-	795.271.403
			C. PENJUALAN	-	-	-	-

K E L O M P O K	JENIS	OBJEK	Uraian/ Nama Bidang Barang	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2021	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 30 Juni 2021
	5.4.1.1	02	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-
	5.4.1.1	03	ASET LAIN-LAIN LAINNYA	-	-	-	-
			Jumlah II	1.080.024.820	-	-	1.080.024.820
8	08		EKSTRACOMPTABLE	38.475.000	-	-	38.475.000
		1	Peralatan dan Mesin (KIB B)	31.475.000	-	-	31.475.000
			a. Baik/Kurang Baik	8.400.000	-	-	8.400.000
			b. Rusak Berat	100.000	-	-	100.000
			c. Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK)	22.975.000	-	-	22.975.000
		2	Gedung dan Bangunan (KIB C)	7.000.000	-	-	7.000.000
			a. Baik/Kurang Baik	-	-	-	-
			b. Rusak Berat	7.000.000	-	-	7.000.000
			c. Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK)	-	-	-	-
			(Dapat ditambahkan sesuai kondisi yang ada)				
			Jumlah III	38.475.000	-	-	38.475.000
			Jumlah I+II+III	8.300.617.803	122.626.400	-	8.423.244.203

- Petunjuk Pengisian:

 - Diisi Kode Kelompok (3) Yaitu Kelompok ASET TETAP, Kode Kelompok (5) Yaitu Kelompok ASET LAINNYA, Kode Kelompok (8) Yaitu Kelompok ASET EKSTRACOMTABLE
 - Diisi Kode Jenis Aset Tetap (1,2,3,4,5,6), Kode Jenis Aset Lainnya (2,3,4)
 - Diisi Kode Objek Barang.
 - Diisi Uraian/ Nama Bidang Barang
 - Diisi Saldo Awal (Audited).
 - Diisi Total Mutasi Tambah
 - Diisi Total Mutasi Kurang
 - Diisi Saldo Akhir
 KETERANGAN : Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD

REKAPITULASI PENYUSUTAN DAN NILAI BUKU PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGAPAN 2021

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 4											
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7+8)	10 = (5+9)	11 = (3-10)	
KIB A	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIB B	PERALATAN DAN MESIN	2.555.976.532,00	2.262.595.755,00	2.262.595.755,00	-	70.734.500,00	54.722.764,00	125.457.264,00	2.388.053.019,06	167.922.513,00	
	01	ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	ALAT ANGKUTAN	701.405.358,00	680.787.388,00	680.787.388,00	-	12.127.278,00	8.490.692,00	20.617.970,00	701.405.358,00	-
	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04	ALAT PERANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	367.688.432,00	333.701.643,00	333.701.643,00	-	4.602.670,00	4.352.254,00	8.954.924,00	342.656.567,00	25.011.865,00
	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	197.725.900,00	129.579.291,00	129.579.291,00	-	6.311.150,00	8.781.850,00	15.073.000,00	144.652.291,00	53.073.609,00
	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09	ALAT PERSENUAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KOMPUTER	1.269.195.842,00	1.098.547.433,00	1.098.547.433,00	-	47.693.402,00	33.117.968,00	80.811.370,00	1.179.358.803,00	88.837.039,00	
11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	RAMBU - RAMBU	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	-	-	-	-	19.980.000,00	-	
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIB C	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.718.788.851,00	951.644.489,00	951.644.489,00	-	46.933.705,00	46.933.704,00	93.867.409,00	1.045.511.898,00	3.673.256.953,00	
	01	BANGUNAN GEDUNG	1.089.677.400,00	292.202.600,00	292.202.600,00	-	10.996.774,00	10.996.774,00	21.993.548,00	314.196.148,00	785.481.252,00
	02	MONUMEN	395.200.000,00	40.672.667,00	40.672.667,00	-	1.976.000,00	1.976.000,00	3.952.000,00	44.624.667,00	350.575.333,00
	03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	3.223.891.451,00	618.768.222,00	618.768.222,00	-	33.960.931,00	33.960.930,00	67.921.861,00	686.691.083,00	2.537.200.368,00	
KIB D	JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIB E	ASET TETAP LAINNYA	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	
	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Pemerintahan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP
Sampai dengan 31-December-2021

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT Ttn Bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	Semester I	Semester II	AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2021	NILAI BUKU
Aset Tetap									
2		PERALATAN DAN MESIN	7.304.744.333						
1.3.2.2		ALAT ANGKUTAN	2.555.975.532		2.262.595.755	70.734.500	54.722.764	2.388.053.019	167.922.513
1.3.2.2.1		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	701.405.358		680.787.388	12.127.278	8.490.692	0	0
1.3.2.5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	701.405.358		680.787.388	12.127.278	8.490.692	701.405.358	0
1.3.2.5.1		ALAT KANTOR	367.663.432		333.701.643	4.602.670	4.352.254	342.656.567	25.011.865
1.3.2.5.2		ALAT RUMAH TANGGA	207.006.945		177.513.490	4.196.003	3.862.670	185.572.163	21.434.782
1.3.2.5.3		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	129.986.487		125.513.153	406.667	489.584	126.409.404	3.577.083
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	30.675.000		30.675.000	0	0	30.675.000	0
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO	197.775.900		129.579.291	6.311.150	8.761.850	144.652.291	53.073.609
1.3.2.6.2		ALAT KOMUNIKASI	115.967.900		77.540.591	1.151.350	3.602.050	82.293.991	33.673.909
1.3.2.6.4		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	70.098.000		52.038.700	5.159.800	5.159.800	62.358.300	7.739.700
1.3.2.10		KOMPUTER	11.660.000		0	0	0	0	11.660.000
1.3.2.10.1		KOMPUTER UNIT	1.269.195.842		1.098.547.433	47.693.402	33.117.968	1.179.358.803	89.837.039
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER	960.533.062		814.257.512	33.859.812	27.557.574	875.674.898	84.858.164
1.3.2.18		RAMBU - RAMBU	308.662.780		284.289.921	13.833.590	5.560.394	303.683.905	4.978.875
1.3.2.18.1		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	19.980.000		19.980.000	0	0	19.980.000	0
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	19.980.000		19.980.000	0	0	19.980.000	0
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG	4.718.768.851		951.644.489	46.933.705	46.933.704	1.045.511.898	3.673.256.953
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1.099.677.400		292.202.600	10.996.774	10.996.774	314.196.148	785.481.252
1.3.3.2		MONUMEN	1.099.677.400		292.202.600	10.996.774	10.996.774	314.196.148	785.481.252
1.3.3.2.1		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	197.600.000		40.672.667	1.976.000	1.976.000	44.624.667	152.975.333
1.3.3.4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	197.600.000		40.672.667	1.976.000	1.976.000	44.624.667	152.975.333
1.3.3.4.1		TUGU/TANDA BATAS	3.421.491.451		618.769.222	33.960.931	33.960.930	686.691.083	2.734.800.368
5		ASET TETAP LAINNYA	3.421.491.451		618.769.222	33.960.931	33.960.930	686.691.083	2.734.800.368
1.3.5.1		BAHAN PERPUSTAKAAN	30.000.000		0	0	0	0	30.000.000
1.3.5.1.1		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	30.000.000		0	0	0	0	30.000.000
Jumlah Aset Tetap			7.304.744.383		3.214.240.244	117.668.205	101.656.468	3.433.564.917	3.871.179.466
Jumlah			7.304.744.383		3.214.240.244	117.668.205	101.656.468	3.433.564.917	3.871.179.466



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAFTAR PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Sampai dengan 31-Dec-2021

Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Pemerintahan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT Tahun Bulan	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	Scmester I Semester II	AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2021	NILAI BUKU
1. ASET TIDAK BERWUJUD										
1	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	12 2015	220.500.000,00	0 0	184.562.500,00	21.562.500,00	220.500.000,00	0,00
2	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	11 2017	48.000.000,00	0 0	184.562.500,00	21.562.500,00	220.500.000,00	0,00
3	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	11 2017	99.500.000,00	0 0	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00
					73.000.000,00	0 0	78.770.833,00	12.437.500,00	99.500.000,00	0,00
							57.791.667,00	9.125.000,00	73.000.000,00	0,00

DAFTAR PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Printed by: Suni03

7

**BERITA ACARA
REKONSILIASI PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2021**

BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV KALTENG
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah mengadakan Rekonsiliasi Persediaan Barang Pakai habis pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data Persediaan :

Rincian Terlampir

No.	Uraian	Nilai Persediaan 1 Januari s.d 31 Desember 2021			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	SPJ Fungsional	-	381.764.625,00	381.764.625,00	-
2	Hibah	-	-	-	-
3	Reklas Aset Tetap	-	-	-	-
TOTAL KESELURUHAN		-	381.764.625,00	381.764.625,00	-

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data persediaan terkait penyusunan Laporan Keuangan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP. 19690806 1989111002

Bendahara Pengeluaran,



RIZALI HADI
NIP. 198301122010011002

Pembantu Pengurus Barang,



KARIM
NIP. 197311012010011003

BIRO UMUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Petugas Rekon,



MANDAT APRIADY
NIP. 197804212009011004

Petugas Rekon,



DAMANG, A. Md
NIP. 197208072007011017



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGG
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Jl. R.T.A Milono Km. 5,5 Telp. (0536) 3226869 – 3226870 Fax. (0536) 3226872

PALANGKA RAYA 73111

BERITA ACARA

INVENTARISASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021

Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bahwa pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, telah mengadakan Inventarisasi Persediaan Barang Pakai Habis pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terdapat barang pakai habis berupa :

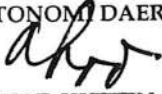
1. Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp.	-
2. Beban Bahan-Bahan Kimia	Rp.	-
3. Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp.	-
4. Beban Bahan-Bahan Baku	Rp.	-
5. Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	Rp.	-
6. Beban Bahan-Barang dalam Proses	Rp.	-
7. Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	Rp.	-
8. Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	-
9. Beban Bahan-Isi Tabung Gas	Rp.	-
10. Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp.	-
11. Beban Bahan-Bahan Lainnya	Rp.	-
12. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp.	-
13. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Rp.	-
14. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp.	-
15. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Rp.	-
16. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	Rp.	-
17. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	Rp.	-
18. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp.	-
19. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	Rp.	-
20. Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-
21. Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp.	-
22. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	-
23. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp.	-
24. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp.	-
25. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp.	-
26. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/ Administrasi	Rp.	-
27. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	-
28. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp.	-
29. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp.	-
30. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	Rp.	-
31. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporalap dan Perlengkapan Satwa	Rp.	-
32. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	Rp.	-
33. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp.	-
34. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	Rp.	-
35. Beban Obat-Obatan-Obat	Rp.	-
36. Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp.	-
37. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp.	-
38. Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp.	-
39. Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan	Rp.	-
40. Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan	Rp.	-
41. Beban Natura dan Pakan-Natura	Rp.	-

42. Beban Natura dan Pakan-Pakan	Rp.	-
43. Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp.	-
44. Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	Rp.	-
45. Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	Rp.	-
46. Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	Rp.	-
47. Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	Rp.	-
48. Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	Rp.	-
49. Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	Rp.	-
50. Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	-
51. Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	-
52. Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp.	-
53. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	Rp.	-
54. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp.	-
55. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	Rp.	-
56. Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	-
57. Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp.	-
58. Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp.	-
59. Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.	-
60. Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp.	-
61. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp.	-
62. Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp.	-
63. Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp.	-
64. Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp.	-
65. Beban Pakaian Penyelamatan	Rp.	-
66. Beban Pakaian Siaga	Rp.	-
67. Beban Pakaian Teknik	Rp.	-
68. Beban Pakaian Pelatihan Kerja	Rp.	-
69. Beban Pakaian Kerja Laboratorium	Rp.	-
70. Beban Pakaian Kerja Bengkel	Rp.	-
71. Beban Pakaian KORPRI	Rp.	-
72. Beban Pakaian Adat Daerah	Rp.	-
73. Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp.	-
74. Beban Pakaian Olahraga	Rp.	-
75. Beban Pakaian Paskibraka	Rp.	-
76. Beban Pakaian Jas/Safari	Rp.	-
Jumlah		Rp. -

Hasil inventarisasi dinyatakan dengan jelas sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini, yang selanjutnya dipakai untuk menyusun Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021

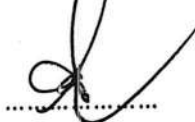
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690806 1989111002

Tim Inventarisasi Persediaan Barang Pakai Habis :

1. ANNA NORITHA, SE., M.Si
NIP. 196612021993032011
(Kabag Pemerintahan)
2. KARIM
NIP. 197311012010011003
(Pembantu Pengurus Barang)


.....

.....

8

LAIN - LAIN
YANG DIANGGAP PERLU



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Format D.II.C

Setoran seperti ini yang ke 08/12/2021
100 1000101005004 205 IDR 149,243,859 K
115 115001100101031360 IDR 149,243,859 K
REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
G SET SUSU UP BIRO PMRNTN DAN OTONOMI DAERAH SETOR PROV KLT

SURAT TANDA SETORAN

Lembar ke

Setoran Seperti ini Yang

TA 2021 08/12/2021 13:34:17
Terakhir telah dilaksanakan

pada tanggal

Kepala Kas Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Di Palangka Raya

Harap Menerima Uang Sebesar Rp 149.243.859,-
(Dengan Huruf) : Seratus Empat puluh Sembilan Ratus Dua Ratus Empat
Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima puluh Sembilan Ratus
Yaitu

Sisa Uang Restitusi Biro Pemerintahan dan otonomi
Daerah Setda prov. kal-teng Tahun Anggaran 2021

Mata Pembukuan :

Kode Rek,

Kontrapos :

P. Raya tgl. 8/12/2021

(Bendahara / Bendahara
Bantuan)

Rizali Hadi
Jabatan dan tanda tangan
Penyetor

Uang tersebut diatas diterima

08 Desember 2021

CHINTYA
TELLER

NO REK 1000101005004

Pemegang Kas Daerah

Catatan : Dipakai Oleh :

a. Bendahara pengeluaran untuk menyetor sisa UUDP

b. Bendahara/Bendahara Pembantu untuk menyetor Pungutan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Format D.II.C

000500012 115 00005 02/12/2021
Setoran seperti ini yang Rp IDR 57,500 K
100 1000101005004
115 115001100101051300 IDR 57,500
KEMERIN KAS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
G SET PD TEKON AN DEDY IRANAN WIWIN 02/12/2021 08:56:39

SURAT TANDA SETORAN

Lembar ke
Setoran Seperti ini Yang
Terakhir telah dilaksanakan
pada tanggal

Kepala Kas Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Di *Praura Raya*

Harap Menerima Uang Sebesar Rp
(Dengan Huruf) : *tujuh ratus lima puluh tujuh ribu*

Yaitu

pengembalian perjalanan Dinas Tenaga Kontrak
Mr. Dedy Irawan Rp. 180.000 - ulu
Pradetya Rp. 180.000 + Rp. 397.500 =
Rp. 577.500 -
Kegiatan fasilitasi Administrasi Kepala Daerah
Dan DPA Kode Kegiatan 4, 01, 03, 1, 22, 01
Belanja perjalanan Dinas Dinas Kode Rek,
5.1.02.04.01.0001

bisa KEMERIN TANG

Mata Pembukuan :
Kode Rek,

Kontrapos :

P. Raya tgl. *02 Des 2021*

(Bendahara / Bendahara
Pembantu)

(.....)

(Na)

Wiwin Pradetya

1. Jabatan dan tanda tangan
si Penyetor

Uang tersebut diatas diterima
02 Desember 2021

CHINTYA
(Nama)
TELLER

NO REK 1000101005004

Pemegang Kas Daerah

Catatan : Dipakai Oleh :

- Bendahara pengeluaran untuk menyetor sisa UUDP
- Bendahara/Bendahara Pembantu untuk menyetor Pungutan Daerah





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Format D.II.C

c000500011 115 c0005 02/12/2021

Setoran Kas Daerah Yang IDR 380,000 K

115 115001100101031000 IDR 380,000 D

REKORSTAS UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

G SET PENGMBILIAN PD TEKON AN ALDIANSTAH 02/12/2021 08:55:12

SURAT TANDA SETORAN

Lembar ke

Setoran Seperti Ini Yang

Terakhir telah dilaksanakan

pada tanggal

Kepala Kas Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah

Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Di *Paya Raya*

Harap Menerima Uang Sebesar Rp

(Dengan Huruf) :

Yaitu

Kontrak

Rekapitan

Rekening

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

6101000000000000

P. Raya tgl. 1 Des 2021

(Bendahara / Bendahara
Pembantu)

(.....)

(Nama)
Arb'as'as'as'

1. Jabatan dan tanda tangan

si Penyator

Uang tersebut diatas diterima

02 Desember 2021

(**CHINTYA**
(Nama)
TELLER)

NO REK 100101005004

Pemegang Kas Daerah

[Signature]

1. Jabatan dan tanda tangan

si Penyator

SERATIE

Pemimpin

Catatan : Dipakai Oleh :

a. Bendahara pengeluaran untuk menyator sisa UUDP

b. Bendahara/Bendahara Pembantu untuk menyator Pungutan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Format D.II.C

000500013 115 00005 02/12/2021
Setoran seperti ini yang ke
100 1000101005004 808/ IDR ,200,000 K
115 115001100101031360/ IDR ,200,000 K
dalam tahun
REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
G SET PENGELUARAN PD TEKON AN ALDIANSYAH BIRDEM SETOR KLTG

SURAT TANDA SETORAN

Lembar ke

Setoran Seperti ini Yang
Terakhir telah dilaksanakan

pada tanggal

Kepala Kas Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Di Palangra Raya

Harap Menerima Uang Sebesar Rp

1.200.000,-

(Dengan Huruf) :

Satu juta dua ratus Ribn Rupiab
pengembalian perjalanan Dinas Lengk

Yaitu

Kontrak An. Andiansyah Sebesar Rp 450.000
Isa Herani, ST Rp 412.500 dan PIPK Kaskiat
P. 337.500 Kegiatan pengelenggaraan Rapat
Koord dan Koordinasi SKPD Kode Ref. 4.01.01.06.09
Belanja perjalanan Dinas Kode Rekening
5.1.02.04.01.0001
dan pengembalian

Mata Pembukuan :

Kode Rek,

Kontrapos :

P. Raya 1 Des 2021
tgl

(Bendahara / Bendahara
Pembantu)

(.....)

(Nama)
Andiansyah

1. Jabatan dan tanda tangan
si Penyator

Uang tersebut diatas diterima

02 Desember 2021

CHINTYA
(Nama)
TELLER

NO REK 100/101005004

Pemegang Kas Daerah

Catatan : Dipakai Oleh :

- Bendahara pengeluaran untuk menyator sisa UUDP
- Bendahara/Bendahara Pembantu untuk menyator Pungutan Daerah